

LAPORAN
PENELITIAN UNGGULAN PRODI



MODEL RELASI PEJABAT POLITIK DAN APARATUR SIPIL
NEGARA
(TAHUN KEDUA)

TIM PENGUSUL

KETUA

Dr. MARTINUS SARDI NIDN : 0529095704

ANGGOTA

1. BAGUS SARNAWA, S.H., MHum NIDN : 0021086802
2. WIRATMANTO, S.H., MHum NIDN : 0501085702

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA


AGUSTUS 2019

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN UNGGULAN PRODI

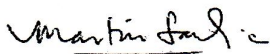
Judul Penelitian : Model Relasi Pejabat Politik dan Aparatur Sipil Negara
Nama Rumpun Ilmu : Sosial Humaniora
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : Dr. Martinus Sardi
b. NIK/NIDN : 19570929201304 153058/0529095704
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Nomor HP : 081329471877
f. Alamat Surel : msardi123@gmail.com
a. Nama Lengkap : Bagus Sarnawa, S.H.,MHum
b. NIK/NIDN : 19680821199303 1 003/0021086802
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Nomor HP : 08572927814
f. Alamat Surel : bagussarnawa@umy.ac.id
Anggota Peneliti
g. Nama Lengkap : Wiratmanto, S.H.,MHum
h. NIK/NIDN : 19570801 198710 153002/0501085702
i. Jabatan Fungsional : Lektor
j. Program Studi : Ilmu Hukum
k. Nomor HP : 081578782910
l. Alamat Surel :
Biaya Penelitian
- Diusulkan ke UMY : Rp. 35.000.000,-
- Dana Internal Prodi :
- Dana institusi lain :

Yogyakarta, 25 Juli 2019

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Leli Joko Stryono, S.H.,MHum
NIK 19681023199303153015

Ketua Pengusul


Dr. Martinus Sardi
NIK 19570929201304 153058

Menyetujui
Dekan




Iwan Satriawan, S.H.,MCL.,Ph.D
NIK 19700706199904 153039

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puja dan puji kami haturkan ke hadirat Allah SWT, karena laporan Penelitian Unggulan Prodi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Laporan penelitian ini disusun sebagai salah satu rangkaian kegiatan pelaksanaan Penelitian Unggulan Prodi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penelitian dilaksanakan dengan dana yang berasal dari hibah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan khususnya kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kepala LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, para nara sumber, responden yang telah memberikan bantuan serta dukungan baik materiil maupun non materiil. Semoga segala amal dan kebajikannya mendapat balasan limpahan pahala yang tidak terkira dari Allah SWT.

Ada pepatah yang mengatakan bahwa tiada gading yang tak retak, demikian pula dengan penyusunan laporan ini tentu saja masih sangat jauh dari sempurna oleh sebab itu tegur sapa dari para pembaca berupa kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis.

Yogyakarta, Agustus 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Ringkasan	v
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
BAB II Urgensi Penelitian	6
BAB III Tinjauan Pustaka	8
A. Pejabat Politik	8
B. Aparatur Sipil Negara	8
C. Relasi Pejabat Politik dan Birokrasi	11
BAB IV Metode Penelitian	14
BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan	16
A. Pengaturan Relasi Pejabat Politik dan Birokrasi	16
B. Relasi Pejabat Politik dan Birokrasi dalam Sistem Kepegawaian Negara ..	36
BAB VI Penutup	50
Daftar Pustaka	51

RINGKASAN

Dalam jangka panjang penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan naskah akademik berkaitan dengan model relasi pejabat politik dan Aparatur Sipil Negara. Pada tahun kedua ini, penelitian ini berupaya untuk menemukan model relasi pejabat politik dan Aparatur Sipil Negara yang mencerminkan pola relasi ideal dimana tidak ada sub ordinasi dari para pihak. Untuk mencapai tujuan, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang meliputi penelitian terhadap asas hukum, pengertian hukum dan ketentuan-ketentuan hukum. Sebagai suatu penelitian yang bersifat normatif maka titik berat adalah penelitian kepustakaan melalui berbagai dokumen (risalah). Oleh sebab itu data yang diperlukan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum berupa peraturan perundangan. Sebagai upaya melengkapi data sekunder, maka peneliti akan melakukan wawancara bebas kepada narasumber. Kajian ini akan bermanfaat bagi Gubernur, Bupati/Walikota dan lembaga pemerintah lain

Kata Kunci : Pejabat Politik, Aparatur Sipil Negara, Relasi